

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Kisah Tragis Anak Perempuan di Industri Seksual Komersial <i>The tragic story of Girls in Commercial Sexual Industry</i> Bagong Suyanto	163–173
Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan Lokal dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS <i>Gender Inequality Against Local Women in HIV/AIDS Prevention</i> Maimunah	174–183
Model Strategi Mitigasi Berbasis Kepentingan Perempuan pada Komunitas Survivor di Wilayah Rawan Banjir <i>Mitigation Strategic Model Based of Women Needs in Survivor Community at flood areas</i> Tri Joko Sri Haryono, Toetik Koesbardiati, Sri Endah Kinasih	184–194
Pembentukan Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Daerah Tertinggal <i>The Establishment of Empowerment Model of Fish Monger Women in Underdeveloped Village</i> Waluyo Handoko, Sofa Marwah, Riris Ardhanariswari	195–201
Sistem Penguasaan Lahan dan Politik Pertanahan di Ekosistem Mangrove <i>The System of Land Tanure and Land Politics in Mangrove Ecosystem</i> Lukas Rumboko Wibowo dan C. Woro M. Runggadini	202–213
Urgensi Kepemimpinan, Modal Sosial dan Kerja Kolektif dalam Pemberdayaan Desa Mandiri Energi <i>Leadership Urgency, Social Capital and Collective Work of Empowerment of Independent Energy Village</i> Hartoyo, R Sigit Krisbintoro, Fauzan Murdapa, Dwi Haryono	214–222
Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik pada Pemilukada <i>Dynamics of Ethnicity and Political Conflict in Pemilukada</i> M. Nawawi, Haslinda B. Anriani, dan Ilyas	223–232

Model Strategi Mitigasi Berbasis Kepentingan Perempuan pada Komunitas Survivor di Wilayah Rawan Banjir

Mitigation Strategic Model Based of Women Needs in Survivor Community at Flood Areas

Tri Joko Sri Haryono¹, Toetik Koesbardiati, Sri Endah Kinasih

Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

This research attempts to understand the disaster management focusing on people participation in disaster relief. Thus, people are not just simply a victim/object of disasters but also as a perpetrator of the disaster. People based programs implemented due to the people as a party affected by the disaster; must be empowered with adequate knowledge and skills, so it is capable to be handling the disaster impact and risk reduction effort. But the program is rarely or never even involving women as victims of natural disasters. The impact is precisely women victims who suffer the most when catastrophic floods. When there are disasters such as floods in Lamongan and Bojonegoro, women always in second place in gain favor. The purpose of this research as an input formulation model of mitigation strategies and development management of natural disasters based upon women interests in flood prone area of the survivor people in East Java. The data of this research obtained from observation and indepth interview with community leaders of the mitigation strategy. The Results in this research indicated that the establishment of a Survivor community where women who has a range of knowledge, culture, experience and credibility was never involved in flood disaster mitigation in finding some of the things they need a priority such as water, food, settlement and health for their families. Community survivors are very important to enable them to formulate solution to re establish its territory. It is caused by the floods by involving women is passed or neglected since it is considered not important. Survivor community formed for women in the community and national level is essential if the form of the recovery is a response to the women needs and associated with.

Key words: survivor community, mitigation, gender-based disaster management, disaster solution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fokus manajemen bencana pada peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Masyarakat tidak hanya sebagai objek bencana tapi juga sebagai pelaku bencana. Program ini didasarkan pada masyarakat sebagai korban bencana, harus diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga mampu menangani dampak bencana dan upaya pengurangan risiko. Namun program tersebut jarang atau bahkan tidak pernah melibatkan perempuan sebagai korban bencana alam. Dampaknya justru perempuan korban yang paling menderita ketika bencana banjir. Bila ada bencana seperti banjir di Lamongan dan Bojonegoro, perempuan selalu di tempat kedua. Tujuan dari penelitian ini sebagai model formulasi masukan dari strategi mitigasi dan manajemen pengembangan bencana alam berdasarkan kepentingan perempuan di daerah rawan banjir dari orang-orang yang selamat di Jawa Timur. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi mendalam dengan tokoh masyarakat dari strategi mitigasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan komunitas Survivor di mana perempuan yang memiliki berbagai pengetahuan, pengalaman budaya, dan kredibilitas tidak pernah terlibat dalam mitigasi bencana banjir dalam menemukan beberapa hal yang mereka butuhkan seperti air, makanan, pemukiman dan kesehatan bagi keluarga mereka. Komunitas Survivor sangat penting untuk merumuskan solusi untuk menstabilkan wilayahnya. Hal ini dikarenakan perempuan selalu diabaikan dalam penanganan bencana. Komunitas survivor yang dibentuk untuk perempuan dalam masyarakat dan tingkat nasional adalah penting sebagai tanggapan terhadap kebutuhan perempuan saat bencana.

Kata kunci: komunitas survivor, mitigasi, manajemen bencana berbasis gender, penanganan bencana,

¹ Korespondensi: T.J.S. Haryono. Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia. Telepon: (031) 5034015. E-mail: trijoko.unair@gmail.com

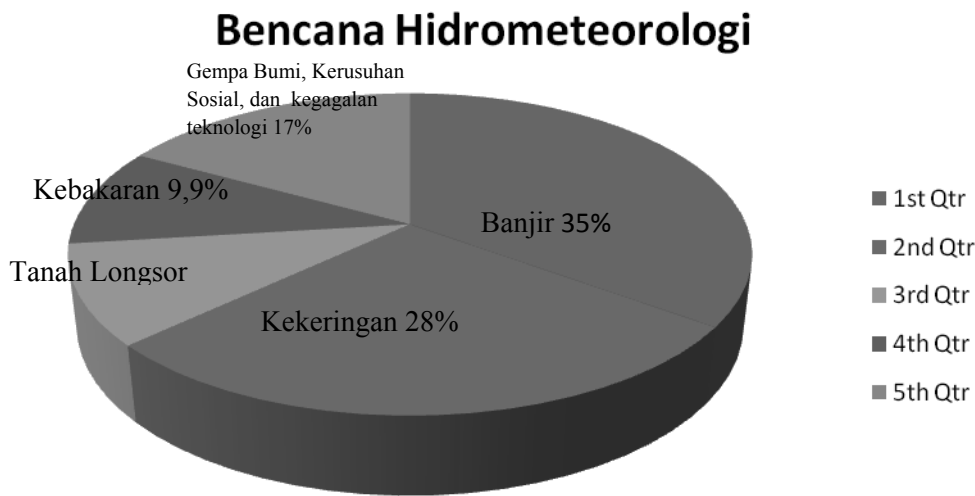


Diagram 1.
Kejadian Bencana di Indonesia
Sumber: Bakornas Penanggulangan Bencana 2006

Tabel 1.
Bencana di Indonesia (1998-2006)

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa (Orang)
Gempa Bumi/Tsunami	57	135.935
Konflik Sosial	74	6.493
Banjir	607	1.452
Tanah Longsor	323	756
Kegagalan Teknologi	14	581
Epidemi	69	738
Kebakaran	146	34
Kebakaran Hutan	49	9
Angin Topan	90	7
Gunung Api	20	4

Sumber: Satkorlak PBP

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah rawan terhadap berbagai kejadian bencana alam, misalnya bahaya geologi (gempa bumi, gunung api, longsor, tsunami) dan bahaya hidrometeorologi (banjir, kekeringan, pasang surut, gelombang besar). Hal ini mengingat wilayah negara Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, klimatologis dan demografis yang berpotensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan faktor alam maupun non alam, seperti bencana yang disebabkan oleh faktor manusia. Keduanya dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB), dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai 2005 tercatat 2.184 kejadian bencana di Indonesia. Sebagian dari kejadian tersebut (53,3%) merupakan

bencana hidrometeorologi. Dari total bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi adalah banjir sebanyak 743 kejadian (35%), selanjutnya kekeringan 615 kejadian (28%), tanah longsor 222 kejadian (10%), kebakaran 217 kejadian (9,9%), dan sisanya 17% kejadian yang meliputi seperti gempa bumi, kerusakan sosial dan kegagalan teknologi. Kejadian bencana di Indonesia dapat dilihat pada diagram 1.

Demikian sumber dari Satkorlak PBP bahwa bencana yang sering menimpa di Indonesia adalah banjir. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Diagram 1 dan Tabel 1. menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Banjir sebagai bencana alam yang setiap tahun terjadi di Indonesia terbukti berdampak pada kehidupan manusia dan lingkungannya, terutama dalam korban jiwa dan kerugian yang bersifat materi. Sebagai contoh, pada tahun 2006 telah terjadi banjir bandang di Jawa Timur, tepatnya di daerah Jember yang menyebabkan 92 orang meninggal dan 8.861 orang mengungsi. Demikian juga di daerah Trenggalek, banjir menyebabkan 18 orang meninggal. Di Manado, Sulawesi Utara juga terjadi banjir disertai dengan tanah longsor, yang menyebabkan 27 orang meninggal, dengan jumlah orang yang terpaksa mengungsi mencapai 30.000 orang. Banjir disertai tanah longsor juga melanda Sulawesi Selatan pada bulan Juni 2006 dengan korban lebih dari 2000 orang meninggal dan puluhan orang dinyatakan hilang (Bakornas PB 2006).

Secara geografis dan geologis Indonesia dapat digolongkan kawasan daerah rawan banjir. Daerah

Tabel 2.
Kota-kota di Indonesia yang Berada di Dataran Banjir

No	Kota	Sungai
1	Jakarta	Kamal , Tanjungan, Muara Angke, Pesanggrahan, Sekretaris, Grogol, Krukut, Cideng, Ciliwung, Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, Cakung
2	Semarang	Kali Garang/kali Semarang
3	Solo, Bojonegoro, Lamongan	Sungai Bengawan Solo, Sungai Tuntang
4	Bandung Selatan	Sungai Citarum Hulu
5	Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya	Sungai Brantas
6	Palembang	Sungai Musi
7	Padang	Batang Arau, Batang Kuranji, Batang Air Dingin
8	Pekanbaru	Sungai Siak
9	Jambi	Sungai Batanghari
10	Medan	Sungai Belawan, Deli, Babura, Percut, Kera
11	Banda Aceh	Krueng Aceh
12	Pontianak	Sungai Kapuas
13	Banjarmasin	Sungai Barito
14	Samarinda	Sungai Mahakam
15	Makasar	Sungai Jeneberang

Sumber: *Program for Hidro-Meteorological Risk Disaster Mitigation in Secondary Cities in Asia*.

Tabel 3.
Jumlah Korban Akibat Bencana Tahun 2002 sampai 2007

Jumlah Bencana	Tahun						Total
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Gempa Bumi	6	65	150	953	5.784	102	7.061
Gempa Bumi dan Tsunami	-	-	165.945	-	683	-	166.628
Letusan Gunung Api	2	-	2	-	2	-	6
Tanah Longsor	40	206	135	212	214	73	880
Banjir dan Tanah Longsor	132	205	45	77	228	346	1.033
Banjir	238	483	100	68	379	122	1.390
Angin Topan	4	3	11	4	11	24	57
Gelombang Pasang/Abrasi	-	-	-	-	-	3	3
Kegagalan Teknologi	2	258	78	277	562	248	1.425
Total	424	1.221	166.466	1.591	7.863	918	178.483

Sumber : Makalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Sosialisasi Gladi Pos Komando dan Dril Penanggulangan Bencana, Lido, 20-23 Juli 2008

rawan banjir di Indonesia adalah kawasan yang berpotensi untuk dilanda banjir, dengan indikasi pernah atau berulang kali terjadi banjir. Daerah rawan banjir di Indonesia sebagian besar disebabkan karena luapan air sungai. Di seluruh Indonesia, tercatat 6.000 sungai induk dan 5.590 di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup oleh sungai-sungai induk mencapai 1,4 juta hektar (*program for hidro-meteorological risk disaster mitigation in secondary cities in Asia*). Tabel berikut ini menunjukkan beberapa lokasi di Indonesia yang berada di dataran banjir.

Tabel 2 menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Jawa Timur (termasuk Surabaya) dikelilingi sungai Brantas, sedangkan Bojonegoro dan Lamongan dikelilingi sungai Bengawan Solo. Banjir yang merendam daerah Lamongan dan Bojonegoro

disebabkan meluapnya Sungai Bengawan Solo dan Sungai Tuntang. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PNPB), luapan Sungai Bengawan Solo yang terjadi sejak 26 Februari 2009 hingga minggu pertama bulan Maret 2009 akibat curah hujan tinggi di beberapa wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, mengakibatkan banjir yang melanda 8 kabupaten, yaitu Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Lamongan, Gresik, Kediri, Pasuruan dan Sampang. Total kerusakan akibat banjir tersebut adalah 17 rumah rusak berat, 36 rumah rusak ringan, 63.519 rumah terendam. Selain rumah, fasilitas umum yang terendam adalah 340 unit sarana pendidikan, 7 unit sarana kesehatan, 565 tempat ibadah, 20.083 hektar lahan pertanian dan ribuan hektar tambak juga ikut terendam. Ada sebanyak 91.631 jiwa menderita.

Total kerugian akibat banjir di Jawa Timur mencapai Rp 389 miliar. Kerugian terbesar melanda kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 211 miliar (Kompas 2009).

Tabel 3 merupakan data jenis bencana dan jumlah korban akibat bencana tahun 2002 sampai dengan tahun 2007.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa jumlah korban akibat bencana secara umum relatif meningkat. Meskipun dalam bencana tidak memilih-milih korban berdasarkan jenis kelamin, usia, sosial-ekonomi, suku bangsa dan agama, namun permasalahan yang mengemuka ketika terjadi bencana sangat berkaitan dengan isu gender, khususnya dengan persoalan perempuan yang selama ini kurang diberi perhatian. Pemilahan jumlah korban menurut jenis kelamin sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Pola pikir umum berasumsi bahwa bencana menimpa orang tanpa memilih jenis kelamin. Sebab hal ini dianggap kebijakan penanganan bersifat netral, tidak memilah-milah untuk jenis kelamin tertentu.

Berdasarkan pengalaman komunitas perempuan yang menjadi komunitas *survivor* di India, Turki, Honduras, Jamaika dan Iran, mereka melakukan aksi penanggulangan bencana alam dan bekerja sama dengan komunitas lainnya dalam membangun kembali secara fisik dan psikis. Hal ini terjadi karena perempuan mengerti kondisi di sekitarnya. Komunitas *survivor* ini mengarahkan dan mengawasi distribusi yang diberikan pada masyarakat dengan tepat seperti pendistribusian air, membuka kembali sekolah-sekolah, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, mengurus perempuan yang mengalami menstruasi, hamil, melahirkan sampai pada perempuan yang menyusui anaknya (Poerwandari 2005: 52–53).

Komunitas *survivor* menganggap perempuan terbiasa dengan hal-hal yang berhubungan dengan realitas lokal, maka kekuatan inilah yang digunakan untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri. Mereka biasa mengenal tetangga dan berkomunikasi antar sesama. Perempuan-perempuan di komunitas *survivor* ini berbagi pengetahuan, budaya, pengalaman dan kepercayaan. Mereka ternyata menemukan beberapa hal yang mereka butuhkan seperti air, makanan, pemukiman dan kesehatan keluarga. Pertemuan dan diskusi yang intensif membuat mereka mampu merumuskan solusi bersama. Secara bersama pula mereka menemukan kapasitas dan kekuatan mereka, kemudian mengoptimalkan keahlian yang ada dalam diri mereka sendiri untuk bersama membangun kembali daerahnya. Komunitas *survivor* inilah yang merupakan kelompok transformasi yang berbasis

pada manajemen bencana alam. Kelompok ini juga menyebarkan informasi yang mereka ketahui dari *survivor* ke *survivor* yang lain.

Beberapa pertimbangan seperti yang diuraikan, maka sangat perlu untuk melakukan analisis empiris yang dilandasi dan didasari dengan berbagai data dan temuan lapangan untuk memberikan masukan tentang perlunya penelitian ini. Fakta di masyarakat, perempuan selalu tidak dipertimbangkan dalam memberikan bantuan bencana alam. Manajemen bantuan bencana alam yang berbasis pada kepentingan perempuan sangat perlu sebagai tataran kebijakan yang akan membantu perempuan yang selama ini tidak terpikirkan.

Masalah penelitian ini meliputi: 1) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya bencana banjir di Jawa Timur khususnya Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro? 2) bagaimana pandangan masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) terhadap bencana banjir? dan 3) bagaimana penyusunan kebijakan mitigasi di Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro, apakah sudah sesuai dengan perspektif gender?

Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Beberapa tahapan yang digunakan adalah: 1) penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* di Kecamatan Kanor Bojonegoro dan Laren Lamongan. Pertimbangan diambil dalam menetapkan dua wilayah ini sebagai lokasi penelitian karena, pertama, kedua wilayah ini paling rawan terkena bencana banjir. Kedua, kedua wilayah ini paling banyak kerugian materialnya sebesar Rp 211 miliar dan korban sebanyak 1.631 jiwa menderita; 2) pengumpulan data, antara lain meliputi: a) pengamatan atau *observation*. Dalam pengamatan dapat dilakukan interaksi sosial untuk menemukan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan dalam menghadapi, sebelum dan sesudah, terjadinya bencana, atau bagaimana memperkecil dampak bencana, terutama berupa penyelamatan korban, harta benda, evakuasi dan pengungsian. Dengan demikian, peneliti dapat memahami dan menginterpretasi mitigasi dan manajemen bencana di masyarakat Lamongan dan Bojonegoro. Teknik ini merupakan suatu kegiatan penelitian lapangan, di mana peneliti akan terus menerus melakukan pengamatan yang objektif tentang kehidupan dan kegiatan orang-orang yang menjadi kajiannya, serta melihat kembali kebijakan pemerintah daerah

terhadap daerah yang rawan banjir; b) *indepth interview*. Dalam hal ini peneliti melakukan *indepth interview* dari perspektif gender terhadap kebijakan strategis, manajerial dan teknis yang relevan yang berkaitan dengan pengelolaan bencana. Selain itu, juga menanyakan bagaimana penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai amanat Inpres nomer 9 tahun 2000, dalam Pembangunan Nasional serta UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan gender sebagai salah satu dasar, prinsip serta tujuan Penanggulangan Nasional Bencana Alam (PNBA). Informan yang dipilih meliputi pejabat/petugas Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Palang Merah Indonesia, *survivor*, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana, kepala Kamtibmas, kepala desa dan korban bencana; 3) kajian pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menambah data dari beberapa tulisan yang telah dibukukan, dan untuk menambah wawasan peneliti. Informasi melalui studi pustaka dengan mencari kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Kebijakan strategis ini meliputi Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, dan Peraturan Pemerintah no 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana, sedangkan informasi dari internet, jurnal, serta artikel yang relevan akan diperlukan dalam kelengkapan data; dan 5) analisis data. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data kemudian dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Bencana Banjir di Lamongan dan Bojonegoro

Ditinjau dari karakteristik geografis dan geologis wilayah, Indonesia adalah salah satu kawasan rawan bencana banjir. Sekitar 30% dari 500 sungai yang ada di Indonesia melintasi wilayah penduduk padat. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa, sebagian adalah miskin dan tinggal di daerah rawan banjir. Pada umumnya bencana banjir tersebut terjadi di wilayah Indonesia bagian barat yang menerima curah hujan lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian timur (BMG Jawa Timur 2006). Beberapa wilayah Jawa Timur yang menjadi langganan banjir di antaranya di Kecamatan

Kanor Kabupaten Bojonegoro dan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Faktor yang menyebabkan terjadinya bencana banjir di kedua wilayah tersebut yaitu:

Banjir Akibat Sungai

Banjir ini terjadi karena luapan air Sungai Bengawan Solo dan Sungai Tuntang, di mana kapasitas penyimpanan air di kedua sungai tersebut terlampaui akibat curah hujan yang tinggi selama beberapa hari dengan intensitas rendah (hujan siklonik atau frontal).

Banjir akibat sungai disebabkan karena curah hujan yang tinggi di wilayah selatan Jawa mengakibatkan kapasitas daya tampung bendungan Gajah Mungkur di Wonogiri tidak mampu menahan volume air deras dari wilayah hulu sungai Bengawan Solo. Pilihannya membuka bendungan Gajah Mungkur, yang pada akhirnya mengakibatkan banjir besar di beberapa wilayah hilir termasuk Ngawi, Bojonegoro dan Lamongan. Apabila bendungan Gajah Mungkur tidak dibuka, kemungkinan bendungan tersebut, yang menampung air akibat hujan yang tinggi, dapat mengakibatkan bencana atau banjir yang lebih besar lagi.

Hutan Gundul

Banjir terjadi akibat hujan konvensional dengan intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai. Aliran air banjir dengan kecepatan tinggi akan memiliki daya rusak yang besar dan lebih berbahaya bila disertai tanah longsor, terutama di wilayah Kanor Bojonegoro dan Laren Lamongan yang dikelilingi oleh hutan gundul, yang dapat mempertinggi daya rusak terhadap daerah yang dilaluinya. Beberapa kawasan hutan di Bojonegoro yang gundul seperti di wilayah Dander, Tamayang, Kedungadem dapat berdampak adanya banjir bandang, akibat resapan air berkurang. Banjir yang terjadi memiliki arus yang deras sehingga merusak berbagai sarana dan prasarana yang ada. Bahkan jika ada tanggul yang putus, maka masyarakat tidak bisa tidur karena harus menyelamatkan diri dan hartanya.

Pandangan Masyarakat terhadap Bencana Banjir

Masyarakat memandang bahwa bencana alam adalah kondisi alam yang melekat pada bumi. Masyarakat juga berpandangan tentang kompleksnya dampak yang diakibatkan oleh suatu bencana, tidak hanya mencakup pada kerugian fisik material akan tetapi juga mencakup permasalahan sosial-psikologis bagi mereka yang menjadi korban bencana. Kejadian

bencana yang datang secara berproses dan/atau tiba-tiba menimbulkan efek serius yang tidak hanya dirasakan oleh perorangan, tetapi juga oleh seluruh masyarakat terutama yang bertempat tinggal di tempat terjadinya bencana.

Pandangan semacam ini juga terjadi pada masyarakat di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Bagi masyarakat di daerah tersebut bencana alam yang terjadi secara kontinu setiap tahun seolah-olah tidak pernah menjadi bahan pelajaran, pengalaman berharga atau setidaknya bahan renungan dalam menangani bencana. Hal ini dapat dicermati pada saat seorang informan (Sekretaris Desa Kanor) menceritakan bagaimana kondisi di Kecamatan Kanor Bojonegoro saat terjadi bencana banjir terutama banjir yang skalanya paling besar, yaitu pada tahun 2007. Bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Kanor bisa dibilang cukup parah. Pada saat terjadi bencana banjir, kondisi Kecamatan Kanor terlihat seperti lautan karena banjir merendam rumah-rumah penduduk dengan ketinggian hingga mencapai tiga atau empat meter. Kondisi yang parah semacam ini menjadikan penduduk Kecamatan Kanor sangat menderita. Penduduk Kecamatan Kanor yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani ini tidak bisa bekerja sehingga untuk kebutuhan makanan saat bencana yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu datangnya bantuan.

Kebijakan Mitigasi, Penanganan dan Bantuan Bencana Banjir di Lamongan dan Bojonegoro pada Komunitas *Survivor* Terkait dengan Keterlibatan Perempuan

Undang-undang No. 22 tahun 1999, Undang-undang No. 25 tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah (kota dan kabupaten) untuk mengelola pembangunan kota/daerahnya, khususnya dalam administrasi pemerintahan dan keuangan. Pemerintah kota/kabupaten mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang bertujuan meningkatkan peran kota/kabupaten sebagai pusat pertumbuhan wilayah, penggerak pembangunan, pusat jasa pelayanan dalam segala bidang, serta pusat informasi dan inovasi termasuk dalam hal teknologi mitigasi bencana.

Setiap pemerintah kota/kabupaten perlu mempunyai suatu kebijakan mitigasi bencana dengan mengikuti pedoman atau arahan kebijakan

mitigasi bencana. Kebijakan tersebut selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai titik tolak untuk mengembangkan dan memadukan berbagai program pembangunan yang berwawasan keamanan dan keselamatan warga kota dari bencana yang mungkin terjadi, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. Salah satu sebab pentingnya penyusunan kebijakan mitigasi ini, di samping mengurangi dampak dari bencana itu sendiri, adalah juga untuk menyiapkan masyarakat 'membiasakan diri' hidup bersama dengan bencana, khususnya untuk lingkungan yang sudah (terlanjur) terbangun. Salah satu caranya yaitu dengan mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan memberikan pedoman bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana yang biasa terjadi, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan serta kenyamanan dalam kehidupannya.

Upaya penanganan bencana pada saat ini, mengalami perubahan paradigma maupun tindakan. Penanganan bencana sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 2007, menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi masyarakat bukan hanya sekedar menjadi korban atau objek dari bencana, namun juga sebagai pelaku dari penanggulangan bencana. Metode yang tepat dalam penanganan bencana sekarang ini adalah Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM/CBDP = *community base disaster preparedness*). KBBM adalah program berbasis masyarakat yang mendorong pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk menyiagakan diri dalam mencegah serta mengurangi dampak dan risiko bencana yang terjadi di lingkungannya. KBBM diterapkan karena masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak bencana, harus diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga mampu melakukan upaya penanganan dampak bencana dan pengurangan risiko. KBBM diterapkan di daerah rawan bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, gelombang pasang atau tsunami, dan di mana masyarakatnya mudah bekerja sama (bergotong royong) untuk melaksanakan upaya mitigasi atau pengurangan risiko. KBBM bermanfaat bagi masyarakat yang paling rentan, yang secara langsung terancam kondisi kesehatan, kehidupan ekonomi dan lingkungan hidupnya.

Dengan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan bencana, di mana penekanan diberikan pada proteksi dan keselamatan, tanggung jawab dan implementasinya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama masyarakat. Pada dasarnya paradigma ini

adalah untuk meningkatkan pengelolaan bencana, tidak hanya di fase tanggap, yaitu ketika keadaan bencana datang atau ketika dalam keadaan darurat, akan tetapi juga pengelolaan bencana termasuk pengelolaan untuk mengurangi risiko dalam setiap fase bencana, yaitu fase persiapan (mitigasi), keadaan darurat dan fase sesudah bencana (fase rehabilitasi dan fase rekonstruksi).

Perbedaan lainnya adalah pengelolaan bencana dalam paradigma ini lebih difokuskan pada penguatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan), serta pemangku kepentingan sebagai subjek dalam pengelolaan bencana. Dengan mekanisme ini, diharapkan implementasi pengelolaan bencana akan bekerja baik, menciptakan rasa kepedulian, keterlibatan dan kebersamaan masyarakat dalam mengelola bencana.

Kebijakan mitigasi bencana juga telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu dengan mengadakan pelatihan penanganan bencana berbasis masyarakat. Di kedua daerah ini sudah memiliki posko bencana sebagai tempat berkumpulnya komunitas *survivor*. Komunitas *survivor* ini diharapkan bisa melakukan aksi penanggulangan bencana alam dan bekerja sama dengan komunitas lainnya dalam melakukan pembangunan kembali secara fisik dan psikis. Selain itu juga membantu melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Pada umumnya komunitas *survivor* berada di Kantor Kecamatan, Koramil dan kantor-kantor dinas pemerintah lainnya. Anggota komunitas *survivor* ini biasanya camat, kepala desa, kepala dinas juga termasuk penggerak PKK.

Peran penggerak PKK sebagai roda penggerak emansipasi perempuan juga cukup penting. Namun sejauh ini keterlibatan perempuan dalam penanganan bencana masih sangat kecil. Misal, perannya hanya seputar pada tataran kegiatan domestik, yang tidak jauh dari peran ibu-ibu ketika di rumah, yaitu memasak. Sementara itu keterlibatan dalam rapat-rapat pengambilan kebijakan tentang penanganan bencana maupun keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan tentang bencana belum nampak secara nyata. Akibatnya, penanganan bantuan bagi perempuan, yang tentunya memiliki kebutuhan berbeda dengan laki-laki, belum sepenuhnya tersentuh. Memang ada bantuan yang spesifik untuk kebutuhan perempuan, seperti pembalut wanita atau pakaian dalam, namun bantuan ini tidak langsung disalurkan ke para perempuan yang ada, biasanya mereka harus mengambilnya sendiri di kecamatan atau dengan menyuruh saudara laki-laki atau suami

mereka. Persoalan akan timbul manakala tidak ada orang yang bisa disuruh untuk mengambil bantuan tersebut, maupun tidak ada perahu untuk mengambilnya.

Selain itu, ada juga bantuan berupa susu formula yang disediakan oleh Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas), namun bantuan ini biasanya kurang begitu dimanfaatkan karena mayoritas penduduk desa memang menyusui anaknya dengan ASI. Menyusui anak dengan ASI memang menjadi kebiasaan yang dilakukan sebagian besar penduduk, terkait dengan mahalannya harga susu sehingga tidak bisa dijangkau oleh penghasilan mereka yang rata-rata bekerja sebagai petani maupun buruh tani.

Kondisi yang juga cukup memprihatinkan di saat bencana adalah tidak adanya MCK bagi warga, sehingga kebutuhan akan mandi, buang air besar maupun kecil dilakukan langsung di air banjir, yang tentunya juga akan sangat mengganggu kesehatan mereka, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Seorang informan (sekretaris Desa Simbatan) menuturkan bahwa pasca terjadinya bencana banjir biasanya penyakit yang menyebar adalah diare dan gatal-gatal.

Sifat bencana juga dapat meningkatkan kerentanan perempuan. Misalnya, kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, yang tidak pernah terpantau oleh dinas kesehatan. Pasca banjir banyak ibu mengalami penyakit gatal pada kemaluannya. Ibu-ibu merasa malu dan tabu untuk menceritakan masalahnya berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual pada tim medis. Mereka hanya menunjukkan penyakit gatal-gatal di badan, diare dan muntaber, tanpa menyebut masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual yang dideritanya.

Kesehatan reproduksi terutama menyangkut reproduksi perempuan sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan dan diperiksa karena berhubungan dengan konsep aurat. Dengan adanya mitos ketabuan untuk tidak membicarakan permasalahan seksual dan reproduksi secara publik dan terbuka, maka informasi yang berhubungan dengan persoalan tersebut menjadi sangat kurang (Saifuddin 1999:6). Sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdullah (2001:86) bahwa pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh ideologi agama (dalam hal ini kyai).

Di sisi lain Adrina (1998:158) mengemukakan bahwa banyak petugas kesehatan berpandangan sebaiknya orang yang datang (dalam hal ini perempuan) pada petugas kesehatan tidak perlu diberi informasi terlalu banyak. Dalam praktik pelayanan kesehatan reproduksi, sering perempuan

sebagai pasien tidak mendapat penjelasan mengenai penyakitnya, baik tentang diagnosisnya maupun *treatment* yang diberikan kepadanya, seperti kandungan obat ataupun suntikan yang diterima. Ketidaksediaan mereka menginformasikan penyebab maupun penanganan terhadap masalah kesehatan reproduksi disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah mengendalikan informasi. Mereka bisa mempertahankan kekuasaannya di hadapan perempuan sebagai pasien. Keengganan pihak petugas kesehatan menginformasikan kondisi perempuan mencerminkan bahwa mereka menyamakan pengetahuan yang terbatas atau ketidakyakinkan terhadap diagnosis yang mungkin kompleks. Sebaliknya, perempuan sebagai pasien, juga memiliki pengetahuan yang terbatas tentang masalah kesehatan reproduksi dan dianggap bukanlah sebagai suatu penyakit. Apalagi masalah kesehatan reproduksi belum mendapat perhatian di puskesmas dan laporan di puskesmas tidak muncul sebagai masalah kesehatan reproduksi. Penyakit tipus, malaria, diare, gatal-gatal dimasukkan dalam laporan bulanan di puskesmas sampai ke Dinas Kesehatan. Namun masalah kesehatan reproduksi tidak muncul, baik di puskesmas maupun di Departemen Kesehatan karena kesehatan reproduksi di kalangan perempuan dianggap tidak bermasalah (Mohammad 1996: 31–32).

Komunitas *survivor* tidak melibatkan perempuan dalam memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan di dalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana, padahal perempuan dan anak merupakan kelompok rentan bencana. Salah sebab tidak dilibatkannya perempuan dalam penanggulangan bencana banjir, yaitu kebijakan penanggulangan bencana yang tidak sensitif terhadap isu gender mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan (termasuk anak-anak dan lansia) dalam kesempatan memperoleh akses, manfaat serta partisipasi dan kontrol dari kebijakan, program, maupun bantuan bencana yang diberikan. Para pengambil kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana sering memahami penanganan bencana tidak berpihak atau disebut netral gender. Pelaksana penanggulangan bencana umumnya melihat masyarakat terkena bencana sebagai kelompok homogen, padahal perempuan dan laki-laki berbeda, bukan hanya secara biologis saja, tetapi juga berbeda dalam kebutuhan, peran dan status gender. Hal ini berdampak pada tanggung jawab, hak, kewajiban, pengalaman, termasuk dalam memperoleh akses dan manfaat dari program

pembangunan, serta mempromosikan partisipasi perempuan dalam setiap usaha rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Laren selama ini belum banyak melibatkan perempuan, terutama dalam mengambil kebijakan maupun menetapkan strategi penanggulangan bencana. Pada saat terjadi bencana, perempuan dilibatkan dalam penanganan akan tetapi hanya mereka bertugas di dinas-dinas pemerintah saja seperti bidan, perawat, sedangkan perempuan dari masyarakat biasa belum ada bahkan untuk terlibat dalam berbagai pelatihan tanggap darurat bencana sekalipun. Sebagaimana penuturan Pak Burhan Bahwa: Perempuan sama sekali tidak dilibatkan, kalau untuk mencukupi kebutuhan perempuan seperti pembalut itu sudah disediakan karena ada donatur yang juga menyumbang pembalut. Sedangkan kalau untuk yang hamil atau melahirkan sudah ada bidan puskesmas yang bertugas di setiap posko. Selain itu juga banyak tenaga medis dari luar.

Kalau ada perempuan yang terlibat dalam penanganan bencana, keterlibatannya hanya jika terjadi bencana banjir yaitu bertugas sebagai pengelola bahan makanan, sedangkan yang lainnya dikerjakan oleh laki-laki. Adapun perempuan yang dilibatkan juga bukan dari penduduk yang menjadi korban bencana akan tetapi dari dinas-dinas pemerintahan maupun para relawan.

Dari gambaran diatas terkait dengan penanganan bencana alam di Bojonegoro dan Lamongan, mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Sesuai dengan tujuan utamanya yaitu mengurangi dan/atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana. Mitigasi dilakukan untuk memperkecil, mengurangi dan memperlunak dampak yang ditimbulkan bencana. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia (*man-made disaster*).

Perempuan memainkan peran penting di kala bencana, karena selain tetap menjalankan tugas dan fungsinya *care giver* dalam keluarga, mereka juga seringkali berperan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, tulang punggung keluarga, terutama ketika ia harus menjadi orang tua tunggal karena suami kehilangan pekerjaan. Tanaman padi hanyut dan ikan di tambak banyak yang hilang, maka suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali.

Tidak jarang perempuan juga terlibat kegiatan sosial seperti membantu di dapur umum dan pos kesehatan. Dalam keadaan bencana, peran dan serta beban perempuan justru bertambah. Perempuan bukan saja sebagai menjadi objek yang harus dilindungi, tetapi juga menjadi subjek berperan aktif sebagai *agent of change*.

Selama ini tidak ada pemilahan data berkaitan dengan korban bencana banjir menurut jenis kelamin. Hal ini terjadi baik di kabupaten Lamongan maupun Bojonegoro. Hal ini berakibat pada penanganan korban bencana dengan berbasis isu gender tidak terkuak. Akibat lebih lanjut penanggulangan bencana belum menerapkan strategi Pengarus-Utamaan Gender (PUG), sesuai amanat Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarus-Utamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional, serta Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang menyebutkan gender sebagai salah satu dasar, prinsip serta tujuan Penanggulangan Nasional Bencana Alam (PNBA). Hal ini juga tercermin dari beberapa realita yang memperlihatkan masih lemahnya pelaksanaan Pengarus-Utamaan Gender (PUG) pada umumnya, dan penanggulangan bencana pada khususnya. Lemahnya pelaksanaan Pengarus-Utamaan Gender (PUG) meliputi: a) masih belum dilaksanakannya analisis gender ke dalam proses perencanaan penanggulangan bencana; b) belum melembaganya data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang berkaitan dengan keadaan demografis, keadaan sosial ekonomi, jumlah penduduk rentan bencana, belum tertanganinya secara komprehensif; c) masih kurangnya perhatian terhadap kebutuhan spesifik perempuan dalam penanggulangan bencana; dan d) peran serta atau partisipasi perempuan belum diakui secara formal dalam penanggulangan bencana karena pandangan budaya patriarkhi mendudukan perempuan dalam posisi pasif.

Dalam pelatihan sebagai relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk pengelolaan bencana ini, perempuan juga jarang/tidak dilibatkan. Apabila dikaitkan dengan pengelolaan bencana, dimensi gender tercantum sebagai asas, prinsip serta tujuan dari Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dari pelatihan tersebut diharapkan dalam pelaksanaan di lapangan, para relawan ini dapat difungsikan sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan bencana. Pada intinya, penanganan pada korban laki-laki dan perempuan pada batasan tertentu perlu mempertimbangkan siapa melayani siapa.

Relawan BPBD (seperti pada kasus di atas: masalah kesehatan reproduksi, bantuan susu formula, dan air bersih) hanya terfokus pada tanggap darurat dan lemah dalam koordinasi dengan satuan pelaksana daerah. Hal ini disebabkan oleh: 1) keanggotaan di BPBD, meskipun memiliki struktur tetapi tidak terikat dan tidak terorganisir dengan baik, sehingga tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Mereka disatukan atas dasar keikhlasan. Mereka dibentuk atas dasar kerelaan sehingga dibutuhkan orang-orang yang memang memiliki jiwa mengabdikan diri di dalamnya; 2) persepsi belum sama, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai di tingkat kecamatan, dalam penanggulangan bencana terutama berkaitan dengan juklak maupun SOP nya. Setiap instansi memiliki juklak dan SOP nya masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya; 3) BNPM belum mempunyai program yang memadai berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir, seperti fase sebelum terjadi banjir, pada saat banjir dan sesudah banjir; 4) anggaran belum memadai (belum dianggarkan dalam APBD). Dalam pelaksanaan berorganisasi, BPBD ini tidak memiliki sumber dana; dan 5) bencana lebih dilihat pada waktu terjadinya saja.

UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, khususnya bab V pasal 26 dan 27 terkait dengan “Hak dan Kewajiban Masyarakat”, serta PP no. 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya pada paragraf 5 pasal 87 poin (1) yaitu, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana. Merujuk pada UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008, tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, belum dilaksanakan dengan baik, bahkan di beberapa lokasi belum memiliki BPBD.

Demikian juga dalam semua kebijakan, disebutkan Pengarus-Utamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi program pembangunan nasional maupun daerah, seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2008, tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah. Dalam kaitannya dengan pengelolaan bencana sudah memasukkan dimensi gender secara eksplisit, yang tercantum sebagai asas, prinsip serta tujuan dari UU No 24 tahun 2007, tentang penanggulangan bencana. Gender seharusnya

menjadi payung dan acuan bagi peraturan yang berada di bawahnya.

Apabila mengkaji kebijakan Surat Keputusan No. 5 tahun 2006, tentang unit operasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi (unit operasi PBP) Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, dan Surat Keputusan No. 8 tahun 2008, tentang pembentukan satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, tampaknya ada disharmoni antara kebijakan strategis (UU No. 24 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2008) dengan kebijakan di bawahnya.

Demikian juga dalam kebijakan di tingkat manajerial, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga/pemda, seperti renstra/program yang berkaitan dengan pengelolaan bencana, hampir bisa dikatakan netral gender. Semua kebijakan penanggulangan bencana mengacu pada tupoksi masing-masing kementerian/lembaga, yang memang belum mencantumkan gender sebagai salah satu strateginya. Paradigma yang dipakai masih bersifat umum dan tanggap darurat. Penyebabnya, meskipun UU No. 24 tahun 2007 sudah mencantumkan gender sebagai salah satu asas, prinsip serta tujuan dari penanggulangan bencana, akan tetapi belum dipahami dan tersosialisasi dengan baik. Sementara itu kementerian/lembaga serta pemda telah mengeluarkan lebih dahulu kebijakan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Pandangan masyarakat terhadap bencana banjir sangatlah tidak netral gender. Ketika terjadi kerusakan lingkungan, perempuan menjadi pihak yang paling berisiko. Bukan hanya karena perempuan dekat dengan alam, tetapi karena alam itu sendiri memiliki dimensi gender (*gendered nature*). Konsep ekofeminisme (*ecofeminism*) berusaha menjelaskan hubungan antara feminisme dan ekologi. Paham yang berkembang awal tahun 1970-an ini menggabungkan elemen feminisme dan gerakan hijau (*green movement*). Ekofeminisme melihat semua manusia dan segala aktivitasnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ekosistem lokal dan global, sedangkan gerakan hijau didasari pada prinsip dasar ekologi yang melihat semua organisme dalam kaitannya dengan lingkungan alam. Kegagalan manusia untuk menghormati keterbatasan ekologis telah menyebabkan terjadinya krisis ekologi pada masa sekarang ini. Ekofeminisme ingin menjelaskan bagaimana ketidakadilan yang ada dalam komunitas manusia direfleksikan dalam hubungan yang destruktif antara kemanusiaan dan dunia alamiah, yang bukan manusia (*non-human natural world*).

Konsep ini menaruh perhatian pada kerusakan ekologis yang disebabkan oleh sistem sosial-ekonomi dan militer kontemporer, serta menganalisa beban, biaya, tanggung jawab dan peran yang harus dijalankan perempuan akibat kerusakan ekologis.

Gadis Arivia dalam artikel ekofeminisme menyatakan lingkungan hidup berurusan dengan perempuan, bahwa perempuan dan alam mempunyai kesamaan simbolik, karena sama-sama ditindas oleh manusia yang berciri maskulin. Dalam praktek-praktek yang berkaitan dengan lingkungan hidup, ada hubungan kekuasaan yang tidak adil, memarginalisasikan perempuan dan merusak lingkungan. Misalnya, di masyarakat pedesaan di negara yang sedang berkembang, relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki memengaruhi jenis bantuan bencana alam (Warren 1996). Hal seperti ini juga terjadi di Kecamatan Kanor dan Laren, bantuan makanan yang diberikan selalu menurut porsi dan jenis makanan untuk laki-laki. Misalnya makanan yang pedas, kurang matang dan nasi agak keras. Bantuan makanan untuk perempuan dan anak hampir tidak ada. Jenis bantuan makanan dianggap sama. Hal ini akibat dari kekuasaan yang dimiliki laki-laki untuk lebih memilih jenis makanan yang menguntungkan, telah menghalangi perempuan untuk makan yang lebih bergizi, dan bisa dikonsumsi untuk anaknya.

Simpulan

Program penanganan bencana di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan masih mengacu pada *stereotype* bias gender, yaitu kebijakan penanggulangan bencana seringkali menempatkan laki-laki pada peran gendernya sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan, tulang punggung ekonomi keluarga, terlibat dalam kegiatan kegotongroyongan, serta menempatkan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, mengurus kegiatan domestik. Hal ini merupakan hambatan bagi kaum perempuan, untuk tidak pernah dilibatkan seperti dalam pelatihan penanganan bencana, sehingga akses untuk mendapatkan informasi tidak didapat secara langsung, atau didapat melalui orang lain atau suami. Akibatnya bisa terjadi distorsi informasi, dan ketika terjadi bencana, perempuan tidak dapat melakukan tindakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dalam hal ini perempuan tidak memperoleh keadilan dalam mendapatkan akses dan informasi dari kebijakan berkaitan dengan program penanganan bencana. Para pengambil kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana sering

memahami penanganan bencana tidak berpihak atau disebut netral gender. Pelaksana penanggulangan bencana umumnya melihat masyarakat terkena bencana sebagai kelompok homogen, padahal perempuan dan laki-laki berbeda, bukan hanya secara biologis saja tetapi juga berbeda dalam kebutuhan, peran dan status gender.

Daftar Pustaka

- Abdullah I (2001) Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan. Yogyakarta: Tarawang.
- Adrina (1998) Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anonim (2008) Makalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Sosialisasi Gladi Pos Komando dan Dril Penanggulangan Bencana. Lido, 20–23 Juli 2008.
- Bakornas PBP (2006) Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006–2009. Kerja sama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana, Jakarta.
- Kurniawan BA (2009) Bencana Banjir, Jatim Rugi Rp 389 miliar. Kompas. [Diakses: 15 Agustus 2010]. <http://regional.kompas.com/read/2009/03/06/19382013>
- Mohammad K (1996) Prioritas Dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Indonesia. Dalam: Agus Dwiyanto & Muhadjir Darwin (ed). Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poerwandari K (2005) Psikologi Korban Pasca Bencana. Jurnal Perempuan 40(2): 75–99.
- Saifuddin AF & Hidayana IM (1999) Seksualitas Remaja. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Antropologi FISIP UI dan The Ford Foundation.
- Warren K (1996) Ecological Feminist Philosophies: An Overview of the Issues. Dalam: Karen JW (ed). Ecological Feminist Philosophies, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.